LA dan PMP Bagi-bagi Sembako

SALATIGA (KR) - Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Lindu Aji (LA) Salatiga dan Pemuda Merah Putih (PMP) Solo bagi-bagi sembako kepada warga di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Salatiga, Rabu (6/9), Ketua DPC Lindu Aji Kota Salatiga, Heri Subroto mengatakan kegiatan ini dikemas bakti sosial pembagian Sembako untuk masyarakat Salatiga khususnya masyarakat di Kelurahan Tegalrejo. "Kami membagi sembako semoga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Tegalrejo yang membutuhkan," kata Heri Subroto kepada KR.

Pada kesempatan ini Lindu Aji dan Pemuda Merah Putih Solo juga sosialisasi dan mengajak masyarakat di Salatiga mengawal dan menyukseskan Pemilu 2024 agar berjalan dengan aman dan lancar. "Mari kita guna--kan hak pilih dengan baik, jauhi kampanye hitam, tolak politik uang, dan laporkan jika ada dugaan pelanggaran," kata Heri Subroto. Ketua Pemuda Merah Putih Solo, Rosyid mengungkapkan baksos dua ormas di Salatiga ini untuk memberikan bantuan kepada warga terutama untuk meringankan beban. **(Sus)-f**

Pemkab Wonogiri Tunda Pilkades

WONOGIRI (KR) - Pemkab Wonogiri terpaksa menunda gelaran pemilihan kepala desa (pilkades) di 50 desa di Kabupaten Wonogiri. Sesuai jadwal 50 desa itu menggelar Pilkades tahun 2024 nanti. Namun karena ada perhelatan Pemilu maka pilihan Cakades dipending hingga setelah Pemilu. Diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri, Antonius Purnama Adi, penundaan Pilkades di 50 desa itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 100.3.5.5/244/SJ.

"Masa pemilu dan pilkada 2024 diperlukan dukungan dan situasi yang kondusif sehingga Pilkades kita pending," ujar Antonius, Rabu (6/9) siang. Dalam SE itu disebutkan Bupati/Wali Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Dsh)-f**

Distribusi Air Bersih Diminta Merata

SUKOHARJO (KR) Donatur dan distribusi air bersih dengan sasaran wilayah kekeringan terdampak kemarau diminta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo. Hal ini dilakukan agar terdata dan terpenting distribusi air bersih bisa merata diterima warga. Sebab perkembangan jumlah warga dan wilayah terdampak kekeringan terus bertambah seiring kondisi cuaca semakin panas pengaruh puncak kedua fenomena alam El Nino pada September ini.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo Ariyanto Mulyatmojo, Rabu (6/9) mengatakan, kebutuhan air bersih untuk warga terdampak kekeringan akibat musim kemarau sudah dijamin Pemkab Sukoharjo. Bantuan air bersih dikirim setiap hari untuk memenuhi kebutuhan warga. Namun demikian, ada sejumlah pihak terkait termasuk swasta menjadi donatur dari Sukoharjo maupun luar daerah membantu mengirim air bersih. **(Mam)-f**

DPRD dan Bupati Grobogan Setujui Raperda Perubahan APBD 2023 Jadi Perda

GEMA DPRD KAB. GROBOGAN

GROBOGAN (KR) - DPRD dan Bupati Grobogan menyetujui dan menyepakati Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 20-23 menjadi Perda. Keputus-an dan persetujuan bersama tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Ketua DPRD Agus Siswanto SSos MAP, Wakil Ketua Ir HM Nurwibowo MSi, H Sugeng Prasetyo SE MM, dan HM Fatah SPDI bersama Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM, dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (7/9).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto itu dihadiri anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, Sekda beserta para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD beserta jajarannya, Kepala Bagian Setda, para Camat dan para Direktur BUMD.

Dalam sambutannya, Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan, berdasarkan laporan hasil rapat kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Grobogan, yang di dalamnya telah disampaikan juga pendapat akhir masing-masing Fraksi Dewan, yang pada kesimpulannya bahwa fraksi-fraksi Dewan menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan AP-BD Kabupaten Grobog-an tahun anggaran 2023 sebagaimana hasil pembahasan. "Dengan telah diterima dan disetujuinya Rancangan Perubahan AP-BD Tahun Anggaran 2023 oleh DPRD tersebut, maka saya juga menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana hasil pembahasan," ujarnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mengamanatkan bahwa paling lambat 3 (tiga) hari kerja, setelah persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan AP-BD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, beserta kelengkapan dokumen lainnya, akan kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi.

"Tujuan diadakan evaluasi adalah agar tercapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan, sehingga hasil evaluasi tersebut dimungkinkan terdapat saran, masukan, koreksi maupun hal lainnya yang kesemuanya bertujuan untuk kesempurnaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 20-23," jelas bupati.

Dengan telah sampainya tahap penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan atas kerja sama yang terjalin baik selama ini, sehingga proses pembahasan dapat berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Mengenai saran, pendapat maupun masukan yang telah disampaikan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, akan dipergunakan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan guna keberhasilan pelaksanaan tugas ke depan. **(Tas)-f**

KR-M Taslim

Bupati bersama DPRD Grobogan menandatangani persetujuan Perubahan APBD 2023 menjadi Perda.

Polda Jateng Serahkan Buku ke Yayasan Kasih Ibu

SEMARANG (KR) - Polda Jateng melaksanakan kegiatan Polri Peduli Budaya Literasi Distribusi Buku di Yayasan Kasih Ibu di Genuk Sari, Semarang, Rabu (6/9).

Pada kesempatan itu diserahkan bantuan 1.575 buku tentang keagamaan, cerita rakyat hingga konten edukasi oleh Karo SDM Polda Jateng Kombes Pol Yohanes Ragil Heru Susetyo kepada Pimpinan Yayasan Kasih Ibu Semarang, Hedi Rahmat SCom SH MH.

Hedi Rahmat mengucapkan apresiasinya atas program yang dilaksanakan Polri ini. Dirinya berharap budaya literasi makin berkembang di tengah masyarakat khususnya di Kota Semarang. "Terima kasih kepada Kapolri termasuk Kapolda Jateng, yang peduli kepada Masyarakat melalui pembagian buku ini. Diharapkan dengan kegiatan ini semakin mendorong tercipta budaya literasi sampai dengan lapisan bawah terutama di kawasan ini," tuturnya.

Karo SDM Polda Jateng Kombes Yohanes Ragil Heru Susetyo menjelaskan dipilihnya Yayasan Kasih Ibu Semarang bukan tanpa alasan. Yayasan ini dinilai cukup aktif dan memiliki lembaga pendidikan tingkat PAUD dan TK. "Warga masyarakat sekitar juga mempunyai semangat sangat tinggi serta sadar tentang pentingnya budaya literasi, dimana setiap pagi dan sore cukup banyak warga masyarakat yang memanfaatkan waktunya untuk membaca," kata Yohanes Ragil.

Kegiatan positif serupa juga dilaksanakan serentak dijajaran Polda Jawa Tengah mulai dari Polresta/tabes sampai dengan Polsek-Polsek sehingga diharapkan kedepan dengan bantuan pendistribusian buku ini mampu mendorong minat baca anak-anak sedari usia dini sampai pelosok Jateng. **(Cry)-f**

KR-Karyono

Karo SDM Polda Jateng Kombes Yohanes Ragil Heru Susetyo bersama dengan anak-anak pecinta buku.

RSUD Tjitrowardojo Buka Tiga Layanan Baru

KR-Jarot Sarwosambodo

Peluncuran layanan di RSUD Dr Tjitrowardojo.

PURWOREJO (KR) - RSUD Dr Tjitrowardojo Purworejo membuka tiga program layanan kesehatan baru. Rumah sakit tipe B itu membuka layanan konsultasi kesehatan online yang dinamai Sultan Bejo, laboratorium patologi anatomi dan pemeriksaan papsmear, dan hemodialisa dengan metode CAPD.

Peluncuran dilakukan Kepala Dinas Kesehatan Purworejo dr Sudarmi MM didampingi Direktur Utama RSUD Dr Tjitrowardojo dr Tolkha Amaruddin, di aula rumah sakit, Kamis (7/9). Peluncuran program ditutup dengan seminar kesehatan tentang kesehatan remaja.

"Layanan baru itu bagian dari inovasi yang semakin memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat," ungkap dr Tolkha Amaruddin, kepada KR, usai peluncuran program.

Menurutnya, RSUD Tjitrowardojo terus bertransformasi menjadi rumah sakit berkonsep *one stop service*. Hal itu, katanya, sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Tengah yang membuat program Rumah Sakit Tanpa Dinding di seluruh wilayah. Rumah Sakit Tanpa Dinding, lanjut Tolkha, adalah kiasan bahwa rumah sakit pemerintah harus memiliki segala jenis fungsi pelayanan kesehatan, mulai sisi kuratif atau pengobatan, preventif, dan promotif.

"Kami bangun konsep itu di Purworejo dengan harapan semua masalah kesehatan bisa selesai dengan datang ke RSUD Tjitrowardojo, tidak perlu jauh-jauh keluar kota," tuturnya.

Dijelaskan, konsultasi online akan dilayani dengan sebuah aplikasi berbasis android. Untuk tahap pertama, rumah sakit melayani konsultasi psikologi dan psikiatri. Layanan patologi anatomi dan pemeriksaan papsmear dilakukan untuk mendeteksi kanker dan tumor.

RSUD juga melayani hemodialisa atau cuci darah dengan metode CAPD, yakni dengan memasangkan alat pada tubuh pasien. Pasien tersebut, katanya, akan bisa melakukan proses hemodialisa secara mandiri di arahan dokter spesialis.

Kepala Dinkes Purworejo dr Sudarmi mengemukakan, fasilitas yang dimiliki RSUD Dr Tjitrowardojo membuat rumah sakit itu menjadi salah satu rujukan pasien di wilayah Kedu Selatan. RSUD membuka dan mengembangkan layanan penanganan kanker, stroke, jantung, dan urologi. "Untuk tiga besar penyakit penyebab kematian, stroke, jantung, dan kanker, sudah bisa dilayani di Purworejo," katanya.

Ia berharap rumah sakit terus mengembangkan berbagai kompetensi sehingga behasil mewujudkan layanan kesehatan yang lengkap dan menjangku seluruh lapisan masyarakat. "Kompetensi teknis, tenaga medis, sarana prasarana, termasuk pelayanan yang humanis," tandasnya. **(Jas)-f**

Yoyok Sajikan Tari Topeng 'Patmo Pancer' di TBJT Solo

SEMARANG (KR) - Seniman tari asal Kota Semarang Dr Yoyok Bambang Priyambodo kembali menampilkan Tari Topeng karya ciptanya berjudul 'Patmo Pancer' di Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta pada Selasa (5/9) lalu. Tari Topeng ini cukup menarik perhatian publik karena muatan filosofi dan pesan akan karakter kepemimpinan yang menjadi harapan di masa depan Indonesia.

Disajikan sendiri oleh Yoyok didukung tim Sanggar tari Greget Semarang, Tari Topeng 'Patmo Pancer' mendapat apresiasi publik seni di Surakarta dan Jawa Tengah pada umumnya. Yoyok mengatakan bahwa tari yang dibawakan tidak sekadar tontonan atau hiburan semata, namun keberadaannya merupakan sebuah tuntunan budi pekerti dan patuladan tentang hidup yang bermakna menghidupi, baik lahir maupun batin.

"Di sisi lain bahwa sedulur papat lima pancer bagi seorang pemimpin mampu menyikapi perilaku yang baik, bijaksana, jujur, melindungi dan mengutamakan kebutuhan masyarakat," tandas Dr Yoyok Bambang Priyambodo.

KR-Istimewa

Yoyok Bambang Priyambodo (kiri) bawakan Tari Topeng Patmo Pancer di panggung TBJT Surakarta.

Menurutnya, Beksan Topeng Patmo Pancer iku mlakune anun jaman kelakone, bahwa Tari Topeng Patmo Pancer itu selalu berkembang mengikuti lakunya zaman. Dalam sarasehan Tari Patmo Pancer yang digelar usai pementasan, Yoyok mendapat apresiasi. "Saya menilai apa yang ditampilkan cukup bagus, rapi dan tertekstur runtut dalam struktur koreografi tari tradisi, meskipun dikembangkan dengan gaya khas yang dimiliki," kata Djarot Budi Darsono, koreografer asal Surakarta.

Djarot menambahkan bahwa karya tari tidak tiba-tiba muncul dalam hitungan hari, bulan atau 1 hingga 2 tahun, namun melalui proses panjang latihan gerak dan olah pikir.

Di sini baru terungkap, bahwa Yoyok mengalami proses panjang dan tidak bisa dipandang sebelah mata karena diasah oleh para empu-empu tari hebat seperti S Maridi, Sunarno SKar, Wahyu Santosa Prabowo SKar MS, Dr S Parmadi, Dr Daryono dan para tokoh topeng seperti Safitri, Made dan termasuk Djarot Budi Darsono.

Yoyok juga pernah menjuarai Lomba Tari Kelono Topeng dan Tari Bambangan Cakil Tingkat Jawa Tengah. Bahkan banyak pula pentas dilakukan antara lain di Belanda, Singapura hingga Jepang. **(Cha)-f**

Mimbar Legislatif

DTKS Jadi Acuan Pendataan Penanggulangan Kemiskinan

KOMISI E DPRD Jawa Tengah berharap pentingnya sinkronisasi data pemerintah pusat dengan daerah supaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bisa tepat sasaran. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi E Abdul Aziz saat berdiskusi dengan jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati, pekan lalu.

KR-Budiono

Abdul Azis

Sebelumnya, Rabu (23/8), Komisi E DPRD Jawa Tengah juga mengunjungi Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Metra "Pendowo" di Kudus. Saat ini Komisi E tengah fokus pada pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terlebih di Jateng dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial juga memiliki DTKS. Pentingnya sinkronisasi dua pendataan ini supaya penanganan masalah kesejahteraan sosial tidak terganggu. DTKS merupakann data yang dikembangkan oleh kementerian sosial (Kemensos), sementara DTKS Jateng data dikembangkan oleh Dinas Sosial Pemprov Jateng.

Komisi E tidak ingin kedua data ini berseberangan atau tidak sinkron antara satu dengan yang lain, mesti variable dalam pendataan itu beda-beda. Kalau dulu BDT untuk anak di pondok pesantren tidak masuk pendataan, pada DTKS masuk. Untuk itu, Komisi E keliling ke kabupaten/kota untuk mengecek keterpaduan data tersebut.

Kadinsos Pati Indriyanto mengakui DTKS masalah pelik dan dilematis. Variabel miskin, sangat miskin, rentan miskin harus benar-benar valid. Di Pati, tercatat ada 713.360 penerima mandiri, penerima program keluarga harapan (PKH) ada 61.119, penerima sembako 124.942, dan kader pembangunan manusia (KPM) ada 491.351. Desa memang memiliki peran penting dalam pendataan kesejahteraan social.

Eliyah Chariroh dari Dinas Sosial Jateng mengatakan, sebenarnya DTKS Jateng hanya bersifat melengkapi variabel-variabel yang masuk pendataan DTKS. Untuk bisa masuk DTKS, dibutuhkan data dari desa, masyarakat, serta data dari pemerintah. **(*)-f**

(Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Abdul Aziz kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)